

# EVALUASI PROSES KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 03 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Oleh:  
**MARLINA AYANG**  
NIM. E21111027

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak, 2015

*Email : [marlinaayang@gmail.com](mailto:marlinaayang@gmail.com)*

## Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan sertifikasi terhadap guru belum mencapai target yang diharapkan. Rendahnya kualitas guru yang telah sertifikasi dibuktikan dengan rendahnya kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran, kurangnya jam mengajar guru sertifikasi yang seharusnya harus mengajar yang dimiliki guru sertifikasi adalah minimal 24 jam dalam 1 minggu, pemanfaatan media belajar dan sumber belajar yang belum maksimal menjadi indikasi rendahnya kualitas guru yang telah sertifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang evaluasi proses kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru dilihat dari aspek pelayanan langsung, efektifitas, dan efisien belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. Rendahnya kualitas pendidikan yang tergambar dari guru yang sudah sertifikasi dianggap sudah profesional namun sampai saat ini belum mampu memenuhi standar kualitas pendidikan yang ada di Indonesia dan jika dibandingkan dengan negara berkembang dan maju lainnya seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat masih tergolong cukup rendah.

Kata-kata Kunci : Evaluasi, Proses Kebijakan Sertifikasi Guru

## Abstract

The problem in this research is the policy of the teacher certification has not yet reached the target that expected. The low quality of teachers who have been certified can be proved by the low ability to master the teaching materials, a lack of teaching hours for teacher certification whereas the teaching hours for teacher who have been certified is 24 hours in one week, utilizing the media to learn and learning resources that have not maximal indicated the poor quality of teachers which has been certified. This study aims to identify and analyze on the evaluation of policy processes Teacher Certification in SMP 03 Sungai Raya. The method used in this research is descriptive method with qualitative approach. The results showed that teacher certification from the aspect of direct services, effective, and efficient have not run-well in accordance with the expectations of society. The low quality of education reflected from teachers who are already certified considered already professional but until now has not been able to meet the quality standards of education in Indonesia and compared with developing and developed countries such as Singapore, South Korea, Japan, and the United States is still relatively low enough.

*Keywords: Evaluation, The policy of teacher certification process.*

## A. PENDAHULUAN

Sertifikasi merupakan sebuah Instrument dalam mencapai itujuan Pendidikan nasional.Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional, Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Program sertifikasi guru merupakan implikasi dari Undang-Undang No. 14 Tahunn 2005 tentang Guru dan Dosen dimana telah dinyatakan bahwa Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Rendahnya kualitas pendidikan yang ada bukan dikaitkan oleh rendahnya input pendidikan, akan tetapi dikaitkan oleh proses pendidikan yang tidak maksimal dan rendahnya kualitas guru.sebenarnya akar permasalahan minimnya proses yang dilakukan sekolah proses yang tidak sempurna mengakibatkan kualitas produk yang tidak baik, proses pendidikan di sekolah terletak di tangan guru-guru yang

ada, bagaimana melaksanakan pembelajaran, penguasaan materi, komunikasi yang dilakukan terhadap peserta didik, memberikan motivasi belajar, menciptakan kondisi pembelajaran yang kondusif.

Beberapa komponen kompetensi professional yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah : penguasaan bahan ajar beserta konsep, penelolan program belajar mengajar, manajemen kelas, penelolan media dan sumber belajar, serta memiliki wawasan tentang penelitian pendidikan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional, pemerintah menetapkan kebijakan sertifikasi guru.

Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru atau dosen sebagai tenaga professional. Pendidikan yang bermutu merupakan syarat utama mewujudkan kehidupan bangsa yang maju, modern dan sejahtera.

Di lain pihak, pendidikan yang bermutu sangat tergantung pada keberadaan guru yang bermutu yakni guru yang professional, sejahtera dan bermartabat. Sebagaimana yang telah ditetapkan di Negara lain seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat, pemerintah Indonesia juga melakukan intervensi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan

melalui Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 yang lebih dikenal dengan Undang-undang guru dan dosen dalam bentuk sertifikasi guru.

Dasar Hukum dari Sertifikasi yakni:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik di Indonesia.

Berdasarkan pengamatan peneliti saat melakukan penelitian di lapangan mendapatkan informasi dari salah satu pegawai yang ada di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, bahwa masih ada guru yang sudah sertifikasi kurang jam mengajar meskipun pada dasarnya guru yang sudah sertifikasi harus memiliki jam mengajar minima 24 jam dalam 1 minggu.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan, diperlukan satu permasalahan agar permasalahan yang diteliti lebih terarah dan terfokus maka peneliti memfokuskan penelitian pada “aspek proses dan fokus penelitian di SMP

Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Sesuatu yang diasumsi sebagai masalah, tentu tidak cukup hanya berhenti pada pertanyaan asumptif semata tanpa ada pembahasan lebih lanjut tentang masalah tersebut. Karena masalah memiliki ruang lingkup yang universal, maka perlu dibatasi dengan rumusan-rumusan agar mengacu terhadap masalah yang dimaksud. Oleh karena itu, peneliti merumuskan masalah dalam Evaluasi kinerja kebijakan sertifikasi guru adalah sebagai berikut: Bagaimana Evaluasi Proses Kebijakan Sertifikasi Guru dalam konteks meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

## B. KAJIAN PUSTAKA

Pressman Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002:17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa ramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan factor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan

lingkungannya". Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
2. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Chandler dan Plano (dalam Pasolong, 2008:38), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah. Sedangkan kebijakan publik menurut James Anderson (dalam Agustino, 2006:7) adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

Selanjutnya menurut Pasolong (2008:39) idealnya suatu kebijakan publik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik untuk melaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan.
2. Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Menurut Nugroho (2004:183) bahwa sebuah kebijakan tidak bisa dilepaskan begitu saja, kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai evaluasi kebijakan, evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan (Subarsono, 2008:119). Evaluasi baru dapat dilakukan apabila suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui outcome, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, katakanlah 5 tahun sejak kebijakan itu diimplementasikan. Sebab kalau evaluasi dilakukan terlalu cepat maka outcome dan dampak dari suatu kebijakan belum tampak.

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Pengertian Evaluasi Menurut Oemar Hamalik (2008:210), evaluasi merupakan suatu proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam rancang suatu sistem pengajaran. Rumusan ini memiliki tiga implikasi: pertama, evaluasi ialah suatu proses yang terus-menerus, bukan hanya pada akhir pengajaran tetapi dimulai sebelum dilaksanakannya pengajaran sampai dengan berakhirnya pengajaran. Kedua, proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yaitu untuk mendapatkan jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. Ketiga, evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan.

Evaluasi merupakan konsep yang sangat luas sebab subyek yang akan dievaluasi berkaitan dengan proses dan isi kebijakan. Evaluasi dapat dilakukan pada setiap tahapan. Evaluasi merupakan suatu hal yang sangat berharga dan tentu saja evaluasi merupakan suatu hal yang sangat diharapkan. Karena itu Ripley (dalam Wibawa, 1992:16) mencoba merinci berbagai persoalan yang berkaitan dengan evaluasi.

1. Kelompok dan kepentingan mana yang memiliki akses di dalam keputusan untuk menetapkan kebijaksanaan atau program?
2. Apakah program didesain secara baik dan nalar?
3. Apakah sumber daya yang diberikan untuk program cukup memadai untuk memberikan kesempatan mencapai tujuan?
4. Apakah proses yang digunakan dalam membuat keputusan tentang detail program cukup terbuka dan memenuhi prosedur?
5. Dampak apa, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, yang memiliki program terhadap masyarakat didefinisikan secara luas dari pada sekedar terhadap kelompok sasaran?

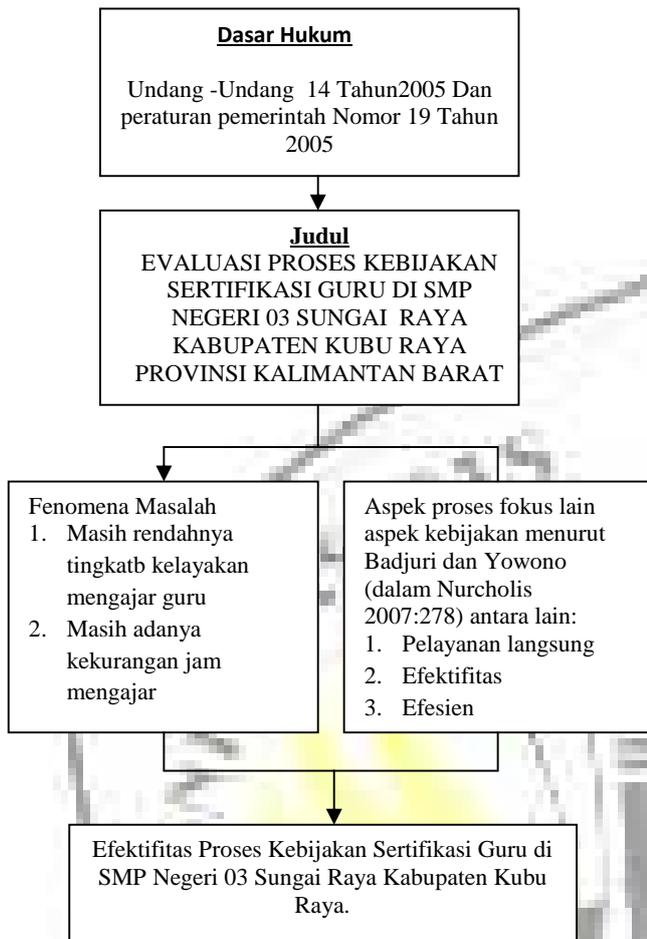
Pengukuran dalam evaluasi bervariasi, secara umum evaluasi kebijakan mengacu pada empat indikator. Indikator-indikator yang dapat dipakai untuk melakukan evaluasi. Evaluasi terhadap kebijakan menurut Budjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007:278) yaitu:

1. Aspek Input, fokus penilaian atau Indikatornya adalah:
  - a) Apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan memadai?

- b) Berapakah SDM, Uang, Infrastruktur pendukung lain yang diperlukan?
2. Aspek Proses, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
- Bagaimanakah sebuah kebijakan diwujudkan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat?
  - Bagaimanakah efektivitas dan efisien metode yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut
3. Aspek Output, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
- Apakah hasil atau produk yang dihasilkan dari sebuah kebijakan publik?
  - Berapa orang yang berhasil mengikuti kebijakan tersebut?
4. Aspek Outcomes, fokus penilaian atau indikatornya adalah:
- Apakah dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan?
  - Berapa banyak dampak positif yang dihasilkan
  - Adakah dampak negatifnya? Seberapa dampak negatif tersebut?
- kebijakan diwujudkan, bagaimana efektivitas dan efisien dengan demikian hasil dari evaluasi akan lebih fokus pada permasalahan dan diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian.
- Pelayanan langsung
    - Memberi informasi secara langsung yang benar-benar valid tentang kinerja kebijakan yang ada.
    - Menilai kepatantasan tujuan atau target dengan segala masalah yang di hadapi.
    - Memberikan kontribusi pada kebijakan lain dengan menghasilkan rekomendasi atas kebijakan yang di evaluasi
  - Efektivitas
    - program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan.
    - tujuan yang dicapai dapat terwujud
    - dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang dilakukan.
  - Efisien
    - input yang digunakan mendapatkan hasil sebanding
    - cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan tersebut.

Dari keempat aspek indikator penilaian evaluasi yang dikemukakan oleh Badjuri dan Yuwono, penulis hanya menggunakan aspek proses yang fokus penilaiannya adalah bagaimana sebuah

Gambar 1  
Bagan Kerangka Berfikir Penelitian



### C. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan Metode penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian secara deskriptif yaitu: “memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau obyek tertentu pada saat peneliti dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya” (Lexy Moleong 2006:18).

Lokasi penelitian ini adalah di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu

Raya, dengan beberapa pertimbangan penentuan lokasi penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Proses kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya belum sesuai dengan prosedur yang ada.
2. Masih rendahnya kualitas guru yang sudah mendapatkan sertifikasi.

Subyek penelitian untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini penulis memerlukan sumber informasi untuk dimintai keterangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, oleh karena itu penelitian ini memerlukan subyek penelitian. Menurut Amir (2000:92) yang dimaksud dengan sunyek penelitian adalah sumber tempat kita memperoleh keterangan penelitian. penentuan subyek penelitian dari unsur penyelenggaraan pelayanan, penulis menggunakan tehnik purposive, yaitu tehnik untuk menentukan informasi berdasarkan tujuan atau keperluan yang ditetapkan peneliti itu sendiri.

Teknik Pengumpulan data Sugiyono (2011:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

## D. HASIL PENELITIAN

### a. Pelayanan langsung sertifikasi guru bagi guru yang mengikuti program Sertifikasi

Dengan adanya pelaksanaan pelayanan sertifikasi ini di harapkan terjadi perubahan dan mutu pendidikan di Indonesia dan meningkatnya kualitas keterampilan mengajar

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menyatakan:

*“Dengan adanya kebijakan dari pemerintah tentang sertifikasi guru ini membawa angin segar bagi para guru khususnya guru yang ada di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, hal ini agar para guru yang ada di SMP ini dapat lebih profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai guru setelah memenuhi uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi, saya harap pemerintah benar-benar menjalankan program sertifikasi ini dengan baik dan benar”.*

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Wakil Kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya:

*“Guru/pendidik merupakan ujung tombak bagi pendidikan karena guru memegang peranan yang cukup penting baik dalam perencanaan maupun*

*pelaksanaan proses belajar mengajar dikelas, menurut saya kebijakan/program sertifikasi ini sudah cukup bagus dan sangat membantu para guru untuk lebih mengembangkan bakatnya, meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan kurikulum yang ada”.*

Berikutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu guru yang sudah mengikuti program sertifikasi guru:

*“saya mewakili beberapa guru yang sudah sertifikasi sangat senang sekali dengan adanya program sertifikasi guru ini, karena sangat membantu kami untuk meningkatkan kinerja guru sesuai dengan tuntutan profesi. Hak-hak dasar kami terpenuhi misalnya adanya perlakuan adil dari pemerintah, memperoleh penghargaan tepat pada waktunya, dan memperoleh kesempatan untuk meningkatkan profesi meskipun untuk mendapatkannya lumayan sulit tapi kami tetap semangat”*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan adanya kebijakan sertifikasi guru merupakan suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seseorang pendidik dalam melaksanakan pendidikan di satuan pendidikan tertentu

Sertifikasi profesi guru hanya diberikan kepada guru yang telah

memenuhi standar kualifikasi akademik dan benar-benar telah memiliki standar kompetensi atau kompetensi minimal yang disyaratkan, dan dalam hal ini hanya akan terwujud apabila program sertifikasi dilakukan secara objektif dan valid dan pelayanan yang diberikan kepada peserta didik dapat diterima secara baik pula.

#### **b. Efektifitas Metode Kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya**

Secara efektifitas melalui pengamatan dan pengumpulan wawancara dalam penelitian ini, bahwa hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan/lokasi penelitian menunjukkan bahwa guru bersertifikat belum sepenuhnya memenuhi sasaran/tujuan sertifikasi guru.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yakni guru merupakan bagian paling menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan yang harus mendapatkan perhatian sentral, pertama dan utama bagi anak didiknya sehingga anak didiknya dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak didik yang berkualitas. Guru juga merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu dan hasil pendidikan yang mempunyai posisi strategis maka setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu memberikan perhatian besar kepada usaha

peningkatan guru baik dalam segi jumlah maupun mutunya. Oleh karena itu usaha apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesionalitas dan berkualitas.

Selanjutnya tanggapan dari Wakil Kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yaitu guru penerima tunjangan sertifikasi tentu harus bersyukur, karena negara meluncurkan dana sertifikasi untuk guru-guru yang sudah memiliki kualifikasi. Dari uang yang diterima guru bersertifikasi telah merasakan manfaatnya terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan sebagai tambahan gaji, jauh sebelum program sertifikasi tersebut diluncurkan mungkin saat itu masih tahap sosialisasi sebagian guru sempat berpikir tentang bagaimana wujud program sertifikasi tersebut. Apakah Kebijakan sertifikasi hanya diberikan kepada segelintir guru yang memang dianggap profesional, atau sertifikasi hanya diberikan sebagai reward/penghargaan kepada guru yang memang dalam seleksi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menyatakan:

*“Para guru khususnya yang ada disini sanga-sangat senang dengan adanya program sertifikasi guru yang diadakan*

oleh pemerintah, dan para guru sangat antusias untuk mengikuti program sertifikasi ini, namun pada kenyataannya meskipun guru di sini rata-rata hampir semuanya sudah sertifikasi namun perubahan secara nampak belum jelas tetapi dari segi sikap sebagian sudah nampak. Serta dalam meningkatkan profesionalitas guru yang belum maksimal dan masih banyak kekurangannya, terutama dalam meningkatkan sarana dan prasarana di kelas karena pada kenyataannya dilapangan saya melihat sebagian besar guru yang sudah sertifikasi masih belum mengetahui apa sebenarnya sertifikasi itu sendiri atau mereka sudah tau tetapi pura-pura tidak mau tau dengan istilah sertifikasi”

Selanjutnya wawancara yang dilakukan dengan wakil Kepala SMP Negeri 03 Sunagi Raya Kabupaten Kubu Raya menyatakan :

“Yang saya lihat pada kenyataannya pada program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh pemerintah ini, saya melihat bagaikan buah simalakama, di satu sisi dengan sertifikasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru di sini, tetapi disisi lain juga meruntuhkan moralitas para guru, yang seharusnya menjunjung tinggi para pendidik, mungkin hal ini di sebabkan tunjangan profesi yang sangat

didambakan para guru tidak begitu saja bisa diperoleh dengan cara mudah. Untuk memperoleh tunjangan sertifikasi, para guru disini harus mengumpulkan portofolio sebagai bukti yang menggambarkan kompetensi mereka dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. untuk mengumpulkan portofolio itulah yang menjadikan biang runtuhnya moralitas para guru, mereka sering kali mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk memenuhi nilai batas minimal agar bisa lolos sertifikasi”

Memang tunjangan sertifikasi guru ini bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, tetapi juga dimaksud untuk meningkatkan kompetensi guru. Paradigma pertama, beranggapan bahwa kesejahteraan guru perlu ditingkatkan agar mereka bisa menjalankan tugas mendidik generasi muda dengan baik. Paradigma ini berasumsi bahwa jumlah tingkat kesejahteraan guru rendah, maka akan sulit bagi mereka untuk menjalankan tugasnya secara baik dan benar seandainya jika para guru tidak menjalankan tugasnya secara baik dan benar maka pendidikan juga sulit diharapkan menghasilkan output yang baik dan benar.

### **c. Efisien Terhadap Program Kebijakan Sertifikasi Guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya.**

Secara efisien Program sertifikasi bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru tetapi harus berimbang dengan tugas dan tanggungjawab guru sebagai pendidik yang profesional agar bisa berjalan dengan maksimal maka sertifikasi juga dimaksudkan untuk mendorong para guru meningkatkan kompetensinya. Meski demikian dalam pelaksanaannya efektifitas dan efisien, kedua tujuan ini tidak selalu berjalan seiring selalu ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak.

Bahkan dikalangan guru sendiripun sering timbul perbedaan pandangan dan pendapat dari masing-masing pihak, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Salah satu dari mereka beranggapan bahwa “peningkatan kesejahteraan guru menjadi prioritas dalam sertifikasi, oleh karena itu tidak perlu ada uji sertifikasi. Sementara ada juga yang lain beranggapan bahwa sertifikasi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi guru, oleh karena itu perlu adanya uji sertifikasi”.

Dari dua pandangan tersebut untuk memperoleh tunjangan propesi, guru harus mengumpulkan portofolio yang kemudian di nilai oleh sertifikator. Bagi mereka yang mampu mengumpulkan nilai 850 dari berbagai kompetensi yang menggambarkan

kompetensi guru (pedagogik, keberibadian profesional, dan sosial), maka dinyatakan lulus dan berhak memperoleh tunjangan profesi yang besarnya satu kali gaji pokok.

Pemberian sertifikat terhadap guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum sepeuhnya mencapai tujuan dari sertifikasi tersebut hal ini berdasarkan pada wawancara oleh peneliti.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan kepala Sekolah SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya:

*“Saya melihat masih banyak penurunan kualitas mengajar dari kebanyakan guru yang sudah bersertifikasi di sini setelah mengikuti program sertifikasi, entah itu karna faktor umur dan pengetahuan yang terbatas terutama tentang penggunaan teknologi yang ada seharusnya guru yang sudah sertifikasi harus mampu menyesuaikan diri meski hanya dasar-dasarnya saja tentang menggunakan teknologi sehingga mampu untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman yang ada sekarang ini. Dan Saya juga tidak begitu paham dengan tujuan mereka untuk mengikuti program sertifikasi guru tersebut, apakah untuk meningkatkan kualitas mengajarnya atau hanya sekedar untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi semata, pada kenyataannya saya melihat sistem mengajar para guru*

*yang bersertifikasi masih sering menggunakan teknik sama sebelum mereka mengikuti sertifikasi tidak ada perkembangan yang menonjol mereka masih saja menggunakan sistem tetapi dari segi yang lainnya juga perlu untuk di nampakkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa kinerja guru yang sudah sertifikasi masih belum memuaskan, motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh guru-guru jenjang pendidikan yang belum lolos sertifikasi dengan harapan segera mendapatkan sertifikasi. Berikut tunjangan profesi, dari hasil wawancara peningkatan kinerja yang diharapkan dari guru yang sudah bersertifikasi, seperti perubahan pola kerja, motivasi kerja, pembelajaran, atau peningkatan diri, dinilai masih tetap sama. Guru –guru yang sudah lulus sertifikasi sudah mulai jarang mengikuti seminar atau pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari guru sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya menyatakan:

*“Saya rasa guru yang sudah mendapatkan program sertifikasi ini, hendaknya dapat melaksanakan tugasnya dengan profesi yang disandangnya sehingga guru perlu melakukan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan keteladanan*

*yang jauh melebihi kemampuan anak didiknya. Sehingga akan menghasilkan anak didik yang memiliki prilaku sesuai dengan yang diharapkan, namun pada kenyataannya bahwa kondisi pembelajaran di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya ini masih bisa di bilang rendah, hal ini dibuktikan dengan guru yang sudah mendapatkan sertifikasi masih kurang kreatif dalam penyampaian proses belajar mengajarnya. Dan tidak jarang juga guru sering bolos kerja dengan alasan yang berbagai macam, sehingga hanya menitipkan catatan pelajaran dengan beberapa halaman guru disini juga jarang menggunakan strategi, metode, media, dan sumber belajar berbeda”.*

Selanjutnya wawancara peneliti dengan salah satu guru yang sudah lulus sertifikasi guru menyatakan:

*“Kami selaku guru yang sudah mendapatkan tunjangan profesi sangat bersyukur karena sudah sangat terbantu, dalam hal ini setidaknya setelah kami mengikuti program sertifikasi selain mendapatkan tunjangan yang besar, manfaat lain yakni kami memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam menunjukkan seseorang yang professional. Untuk meningkatkan kinerja yang tinggi, sehingga kami melakukan kigiatan proses belajar mengajar peneuh dengan usaha keras*

*meskipun harus lebih banyak belajar lagi untuk menutupi segala kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri kami masing-masing. Karna meski kami seorang guru yang sudah dianggap professional, kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan kami dengan keahlian yang kami miliki untuk dapat diterima dan di mengerti oleh para murid, namun memang pada kenyataannya kami sangat kesulitan dalam mengembangkan kreatifitas pembelajaran karena adanya keterbatasan-keterbatasan tertentu”.*

## **E. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya antara lain:

1. Pelayanan sertifikasi guru sudah berjalan dengan baik karena merupakan perwujudan dari undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen dan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Kebijakan sertifikasi guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sertifikasi guru merupakan

suatu bukti pengakuan sebagai tenaga Profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan dalam suatu pendidikan tertentu. Kebijakan sertifikasi untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dan memberikan pelayanan terhadap peserta didik yang berupa kompetensi guru, adapun beberapa kompetensi guru tersebut antara lain kompetensi pedagogic, keperibadian, social, dan professional.

2. Efektifitas sertifikasi guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya belum sepenuhnya memenuhi sasaran dari kebijakan sertifikasi guru yang ada, guru yang sudah sertifikasi bukan hanya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan guru saja, tetapi guru juga di tuntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada karena guru sudah di anggap professional dengan adanya sertifikat pendidik.

3. Efisien dalam pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru masih terdapat kekurangan dari masing-masing guru yang sudah sertifikasi, seharusnya guru yang sudah sertifikasi harus mampu meningkatkan kualitas pendidikan kearah yang lebih baik bagi anak didiknya sehingga menciptakan anak

didik yang tidak hanya sekedar berpendidikan namun juga memiliki kualitas, prestasi, serta mutu pendidikan yang berkualitas. Bukan malah sebaliknya guru yang sudah sertifikasi hanya ingin meningkatkan kesejahteraannya menjadi prioritas dalam sertifikasi.

## 2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih memungkinkan mutu dan manfaat penelitian ini, khususnya bagi instansi terkait dalam hal ini sertifikasi guru di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya sebagai objek penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan langsung semoga dengan adanya Program sertifikasi guru ini, guru yang sudah lulus sertifikasi semakin berkualitas dan merasa memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keberhasilan anak didiknya karena guru yang sudah sertifikasi dianggap profesional untuk menjadikan mutu pendidikan yang ada di SMP Negeri 03 Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya semakin baik dan berkualitas.
2. Efektifitas semoga dengan adanya program sertifikasi ini, guru-guru yang sudah lulus sertifikasi di SMP Negeri 03 Sungai Raya efektifitasnya semakin meningkat dalam segi apapun yang berhubungan dengan pendidikan, yang

ada di sekolah tersebut karena sertifikasi guru bukan semata-mata hanya untuk mengejar tunjangan sertifikasi saja, melainkan juga demi untuk memperbaiki diri dalam pengembangan kreatifitas.

3. Efisien Pemerintah harus lebih selektif lagi dalam memberikan sertifikasi terhadap guru, jangan sampai program ini di salah gunakan sehingga tidak mendapatkan hasil dari tujuan sertifikasi itu sendiri. Pemerintah juga harus mampu melengkapi sarana dan prasarana agar program dari sertifikasi tersebut dapat terlaksana dengan baik.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- Agustinus, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Aswandi, Sudjud.1978. Pengaruh Penelitian. Jogjakarta
- Badjuri, Abdulkhahar dan Yowono, Teguh. 2002, Kebijakan Publik: Konsep dan Strategi. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Dirto Hadisusanto, dkk. 1995. Pengantar Ilmu Pendidikan. Yogyakarta: Fip Ikip Yogyakarta.
- Dunn, William N, 2000, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjadara University Press.
- Hartono, Edi. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Balairung. Yogyakarta.

- Islamy, M. Irfan, 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, J, Lexy. 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy. 2002. Metode Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rodsakarya, Bandung.
- Muslih, Masnur, 2007. Sertifikasi Guru Menuju Profesionalitas Pendidik, Bumi Aksara, Jakarta.
- Mulyasa, 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyasah, E. 2007. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Bandung: PT. Rosdakarya.
- Noeng Muhadjir. 1997. Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial, Suatu Teori Pendidikan. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Nugroho D. Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2010. Teori Administrasi Publik, Bandung: Alfabeta
- Putra, Fadillah. 2003. Pradikma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Bekerjasama Dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Subarsono, 2006. Analisis Kebijakan Publi: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono, 2006. Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2008. Implementasi Kebijakan Publik, Bandung: Asosiasi Ilmu.
- Tohardi, Ahmad. 2008. Petunjuk Praktis Menulis Skripsi, Bandung: Mandar Maju.
- Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik: Proses dan Analisis. Jakarta. Intermedia.
- Yamin, Martinis. 2013. Sertifikasi Profesi Keguruan di Indonesia. Ciputat: Referensi.
- Unsur lain :
- SKRIPSI Fadila Fitri Dian 2004 Evaluasi Program Sertifikasi Guru: Fakultas Fisipol Universitas TanjungPura
- Dirjen Dikti Diknas. 2007. Pedoman Sertifikasi Guru Dalam Jabatan
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 Ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MARLINA AYANG  
NIM / Periode lulus : E21111027/I  
Tanggal Lulus : 13 Juli 2015  
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara  
E-mail address/ HP : [marlinaayang@gmail.com](mailto:marlinaayang@gmail.com) / 08564777967

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika\*) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul\*\*):

EVALUASI PROSES KEBIJAKAN SERTIFIKASI GURU DI SMP NEGERI 03 SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*  
 *content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
Pada tanggal : 9 September 2015

MARLINA AYANG  
NIM. E21111027

Catatan :  
\*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodew/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)